
Haryatmoko,
Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011,
217 hlm.



Buku Haryatmoko – dosen tetap di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, yang juga mengajar di pelbagai Perguruan Tinggi lain di tanah air – ini menggabungkan dua hal yang jarang kita temukan: Kompetensi filosofis dan penguasaan bidang penerapan yang bersangkutan. Etika publik adalah bagian etika yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab dalam pelayanan publik, atau, dalam rumusan Haryatmoko, “refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.” Kekuatan buku ini adalah bahwa penulisnya bukan hanya ahli etika, melainkan juga ahli tentang bidang publik.

Bidang publik memuat apa pun yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diwujudkan oleh aparat negara, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah. Jelas sekali, kita amat berkepentingan agar seluruh unsur bidang publik luas itu dijalankan secara etis. Itulah yang dilakukan Haryatmoko secara mengesankan dalam bukunya ini.

Buku ini sangat sistematis. Daftar isi yang rinci sangat membantu kalau kita mencari sesuatu yang khusus; misalnya penjelasan tentang apa itu etika institusional atau budaya etika, kaitan antara etika, akuntabilitas dan transparansi, dan tentu saja tentang korupsi (namun sayang, tidak ada daftar istilah penting).

Buku ini terdiri dari enam bab, masing-masing dengan delapan sub-bab, yang semuanya dirumuskan dengan jelas. Sesudah menjelaskan bidang bahasannya, yaitu apa yang dimaksud dengan etika publik dan pelayanan publik (Bab I), Haryatmoko memberikan uraian tentang etika

(Bab II) yang sebenarnya juga dapat dipergunakan sebagai kursus dasar etika. Ia menjelaskan dasar-dasar filosofis etika publik (dan karena itu buku ini perlu dibahas dalam jurnal filsafat). Uraian mengesankan dan (bagi peninjau ini) untuk sebagian baru diberikan, yakni tentang "integritas," sebuah istilah yang semakin penting dalam etika manusia pasca-tradisional. Istilah "integritas publik" sebenarnya tidak biasa, namun dalam konfrontasi dengan konflik kepentingan menjadi sangat relevan (Bab III). Tiga bab berikutnya menjadi sangat konkret. Yang dibahas secara rinci adalah "akuntabilitas dan transparansi" (kita teringat Immanuel Kant yang memandang transparansi sebagai kriteria untuk menentukan apakah sebuah kebijakan publik secara etis benar atau tidak), tantangan etis yang ditemukan dalam bidang pengadaan barang serta jasa publik, dan, sebagai bab terakhir, uraian tajam tentang "akuntabilitas dan integritas politisi wakil rakyat." Dalam semua bahasan ini hal korupsi mendapat perhatian khusus. Buku berakhir dengan dua belas halaman usulan konkret yang sangat berguna – seperti misalnya *citizen report card* atau Komisi Pemberantasan Korupsi – tentang bagaimana kita dapat "membangun akuntabilitas dan transparansi."

Kompetensi penulis baik dalam bidang etika – memang itu yang dapat diharapkan dari seorang filosof – maupun dalam bidang publik yang multikompleks sungguh mengagumkan. Uraiannya selalu rinci. Begitu misalnya etika politik harus berhadapan dengan empat pertarungan: korupsi dan kepentingan, ketegangan antara prinsip, nilai pribadi dan tuntutan profesional, pengintegrasian nilai-nilai etis dalam pengambilan keputusan, dan "bagaimana menghadapi logika pasar." Penulis tidak pernah berbicara secara umum saja. Ia, misalnya, tidak hanya menuntut bahwa tindakan harus rasional, melainkan langsung menjelaskan bahwa "tindakan politik disebut rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan; ini mengandaikan kompetensi teknis, *leadership*, dan etika." Hal pelanggaran integritas jabatan publik dirinci sebagai "korupsi, konflik kepentingan, pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya, penyalahgunaan dan manipulasi informasi, penggunaan kekerasan dan metode investigasi yang tidak

benar, diskriminasi, dan perilaku buruk di luar pekerjaan.” Penulis mendasarkan diri pada pustaka luas. Ia tidak pernah jatuh ke dalam kebiasaan buruk untuk mengkhotbahkan norma-norma etis, melainkan menguasai situasi-situasi nyata dalam bidang publik. Misalnya dalam bab VI tentang integritas para wakil rakyat kita menemukan uraian rinci tentang hal gratifikasi atau tentang komisi etika.

Haryatmoko sudah menulis buku yang dikerjakan dengan sangat tangguh, berdasarkan pengetahuan objektif tentang bidang yang dibahas, jelas dalam mengangkat prinsip-prinsip etika dasar, yang karena itu mudah dipakai baik oleh mereka yang menjalankan bidang publik, maupun oleh warga masyarakat yang mau mengawasi bidang publik dengan kritis. Buku ini menunjukkan bahwa suatu usaha filosofis dapat langsung relevan bagi praksis kehidupan bermasyarakat. (*Franz Magnis-Suseno, Program Doktor Ilmu Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta*).

Al Gore,

Our Choice: Rencana untuk Memecahkan Krisis Iklim,
Terjemahan: Hardono Hadi,
Yogyakarta: Kanisius, 2009,
248 hlm.



Masalah lingkungan hidup yang luas dan kompleks makin hari makin difokuskan pada krisis iklim sebab banyak sisi masalah itu akhirnya berujung ke situ. Krisis iklim perlu dipandang sebagai masalah hidup atau mati. Maka sangat berarti bahwa Al Gore, seorang Kristen Baptis, mengawali bukunya dengan mengutip tawaran Musa, “Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. *Pilihlah* kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu” (Ul 30:19). Lewat bukunya, *Our Choice*, Al Gore berusaha meyakinkan sidang pembaca yang luas tentang pilihannya sendiri yang sudah mantap.

Dalam pendahuluan (hlm. 10-29) Gore membunyikan lonceng bahaya yang sedang mengancam bumi, bukan untuk melumpuhkan pem-